

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN *SMART CITY* PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2019-2022**

**Oleh: Ega Pujianti
160563201016**

ABSTRAK

Gerakan menuju *Smart City* adalah sebuah inisiatif dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membimbing Kota/Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan *Smart City*. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang terpilih sebagai *Role Model* dalam gerakan 100 *Smart City* Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Analisis Pelaksanaan Kebijakan *Smart City* pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94). Dan terdapat tiga model yaitu, karakteristik masalah (*tractability of the promblems*), karakteristik kebijakan undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Pengambilan data dilakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi adapun informannya terdiri dari 3 orang, dengan sumber data Primer dan sekunder. Hasil penelitian ini peneliti menemukan kurangnya sumberdaya manusia dalam penggunaan pelayanan publik yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga membuat masyarakat kurang memahami dalam penggunaan teknologi informasi serta kurangnya informasi yang dapat dalam pelayanan tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan *Smart City*. dapat diuraikan dari teori yang digunakan yaitu: Dimensi karakteristik masalah yang menjelaskan bahwa Tingkat kesulitan dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program dilaksanakan. Dimensi Karakteristik kebijakan Kejelasan isi kebijakan yang mana semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Dimensi lingkungan Adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan *Smart City* di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dari tahun 2019. Saran perlu adanya kerjasama antar berbagai sektor karena untuk mewujudkan *smart city* di Kota Tanjungpinang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri akan tetapi perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dan di bantu oleh penganggaran yang sangat besar pula. Di harapkan dalam pembangun pelaksanaan smart city pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan stakeholders dan lembaga lain yang terlibat.

Kata Kunci : Analisis, Pelaksanaan Kebijakan, *Smart City*

**POLICY IMPLEMENTATION SMART CITY AT THE COMMUNICATION
AND INFORMATICS DEPARTMENT IN TANJUNGPINANG CITY, 2019-
2022**

**By: Ega Pujianti
160563201016**

ABSTRACT

The movement towards Smart City is an initiative from the Central Government through the Ministry of Communication and Information to guide Cities/Regencies in implementing Smart City. Tanjungpinang City is one of the cities that was chosen as a Role Model in the 100 Smart City Policy Implementation Analysis policy Smart City at the Office of Communication and Information Technology in Tanjungpinang City in 2019-2022. The research method used is descriptive qualitative and uses the theory of policy implementation proposed by Mazmanian and Sabatier (in Subarsono, 2011: 94). And there are three models, namely, the characteristics of the problem (tractability of the problems), the characteristics of the statutory policy (ability of statute to structure implementation), environmental (nonstatutory variables affecting implementation). Data retrieval was done by observation, interviews and documentation, while the informants consisted of 3 people, with primary and secondary data sources. The results of this study researchers found a lack of human resources in the use of public services that have been provided by the Tanjungpinang City Government, thus making people less understanding in the use of information technology and the lack of information obtained in these services, in implementing Smart City policies. can be described from the theory used, namely: Dimensions of the characteristics of the problem which explains that the level of difficulty of the problem in question. Therefore, the nature of the problem itself will affect whether or not a program is easy to implement. Dimensions of Policy Characteristics Clarity of policy content where the clearer and more detailed the contents of a policy will be easier to implement because implementers are easy to understand and translate into concrete actions. The environmental dimension is the socio-economic condition of the community and the level of technological progress. People who are open and educated will be relatively easy to accept reform programs compared to people who are still closed and traditional. The conclusion is that the implementation of Smart City in Tanjungpinang City has been running since 2019. Suggestions for the need for collaboration between various sectors because to realize a smart city in Tanjungpinang City cannot be done by the government itself, but the need for cooperation with third parties and assisted by budgeting very big too. It is hoped that in developing the implementation of smart cities, local governments can work together with stakeholders and other institutions involved.

Keywords: Analysis, Policy Implementation, Smart City